BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara normatif memang orang tua itu sudah menjadi wali bagi anak kandungnya, dan bisa mewakili anaknya di luar dan di dalam pengadilan, hal seperti ini sesuai dengan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam. Namun, pada kenyataannya peneliti menemukan satu perkara yang keluar dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dimana seorang ibu kandung memohon penetapan perwalian kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atas anak kandungnya, yang permohonan tersebut tercatat dengan nomor register 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn. Penetapan tersebut berisi tentang pengajuan permohonan perwalian yang dilakukan oleh ibu atas anak kandungnya yang ayah kandung anak tersebut atau suami dari pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2007. Pengajuan permohonan perwalian ini untuk dapat mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah, pemohon bermaksud untuk menjual tanah waris bagian anaknya yang belum cukup umur untuk kebutuhan anaknya yaitu untuk kehidupan sehari-hari anaknya tersebut. Bentuk akhir dari permohonan ini adalah Majelis Hakim mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut. Peneliti bermaksud untuk mengangkat penelitian ini dengan judul *“Permohonan Perwalian Oleh Ibu Kandung Atas Anaknya Untuk Melakukan Transaksi Penjualan Tanah Waris Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam menerima permohonan perwalian oleh ibu kandung terhadap anak di bawah umur?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan ibu kandung sebagai wali terhadap anak dibawah umur dalam Penetapan Nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam menerima permohonan perwalian oleh ibu kandung terhadap anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan permohonan penetapan ibu kandung sebagai wali terhadap anak dibawah umur dalam Penetapan Nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn.

D. Definisi Oprasional

1. Permohonan Perwalian yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah permohonan perwalian yang diajukan oleh Ibu kandung terhadap anaknya di Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama.

2. Ibu Kandung pada penelitian ini adalah wanita yang telah melahirkan anak tersebut yang sekarang dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani.
3. Transaksi Penjualan Tanah Waris merupakan perbuatan hukum berupa penjualan tanah waris yang dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap hukum, yang dalam hal ini seorang ibu ingin menjual tanah waris milik anaknya yang belum cakap hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Farid Wajdi ini berjudul Permohonan Orang Tua Sebagai Wali terhadap Anak Kandung (Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor 22/Pdt.P/2010/PA.Dpk. Dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Perkara Nomor 0046/Pdt.P/2009/PA.JP. Perbedaan skripsi penulis dengan peneliti adalah Skripsi penulis membandingkan putusan Pengadilan Agama Depok dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tentang permohonan Wali terhadap anak kandung. Sedangkan skripsi peneliti tidak membandingkan penetapan Majelis Hakim melainkan hanya fokus mengkaji satu penetapan saja.

Erni Nurosyidah menulis skripsi berjudul Kedudukan Hukum Wali Dari Anak Di Bawah Umur Dalam Melakukan Transaksi Penjualan Harta Warisan (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Jember No.95/Pdt.P/2010/PA.Jr). Dalam skripsi yang dibahas oleh penulis ini fokus kepada batasan-batasan wali untuk melakukan transaksi penjualan tanah waris milik anak di bawah umur, sedangkan dalam skripsi peneliti lebih memfokuskan kepada alasan-alasan bagaimana bisa terjadinya suatu permohonan perwalian oleh ibu kandung dan membahas bagaimana pertimbangan dari Pengadilan Agama mengenai permohonan perwalian yang diajukan oleh ibu kandung.

Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg tentang Pengajuan Perwalian Anak di Bawah Umur merupakan skripsi yang ditulis Siti Fatimah. Perbedaan skripsi yang ditulis oleh penulis ini dengan peneliti bahwa penulis dalam skripsi ini menggunakan Hukum Islam untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam mengabulkan penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.M.

B. Landasan Teori

1. Permohonan

Permohonan adalah suatu perkara yang di dalamnya berisi suatu tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hak yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan-badan peradilan dalam mengadili suatu perkara permohonan bisa dianggap sebagai suatu

proses yang bukan sebenarnya.¹ Produk hukum dari permohonan disebut dengan penetapan. Pada prinsipnya yang disebut dengan permohonan itu adalah perkara yang tidak terdapat sengketa atau bisa juga disebut dengan perkara *voluntaria*.

2. Kewenangan Peradilan Agama

Berbicara mengenai kekuasaan atau kewenangan Peradilan Agama, biasanya menyangkut dua hal yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Masing-masing Pengadilan Agama memiliki wilayah hukum tertentu dalam menangani perkara, wilayah hukum inilah yang merupakan kewenangan relatif. Jadi setiap Pengadilan Agama hanya berwenang menangani perkara yang berada dalam wilayah hukumnya saja. Pada intinya penentuan kewenangan relatif ini untuk menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan atau permohonan tersebut akan diajukan. Kewenangan relatif Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatakan bahwa Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota maka daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.² Kewenangan absolut adalah kewenangan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan.³ Kewenangan absolut Pengadilan Agama ada dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

3. *Ultra Petitum* dalam Putusan

Ultra petitum adalah putusan yang mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan.⁴ Putusan yang melebihi atau tidak sesuai dengan *petitum* dapat dikatakan sebagai keputusan yang cacat hukum, dan dapat batal demi hukum, karena pada dasarnya Pasal 178 ayat (3) HIR jo Pasal 189 ayat (3) RBg dibuat untuk membatasi kebebasan hakim agar dalam menjalankan tugasnya yaitu memberikan putusan atau penetapan tidak berlebihan. Selain itu juga untuk mencegah agar hakim tidak memberikan amar putusan yang tidak sesuai dengan *petitum* yang diajukan oleh penggugat atau pemohon.⁵

4. Perwalian

a. Perwalian Bagi Anak kecil Menurut Hukum Islam

Perwalian dalam Islam dibedakan kedalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa, perwalian terhadap harta, serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus. Yang termasuk kedalam perwalian terhadap jiwa, yaitu perwalian yang berhubungan dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak,

¹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama: Dilengkapi Format Formulir Perkara* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) h. 82

² Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perbuahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

³ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, h. 204

⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. h. 801

⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) h. 233

kesehatan dan aktivitas anak (keluarga).⁶ Para ulama sepakat bahwa wali bagi anak kecil adalah ayahnya, sedangkan untuk ibunya tidak mempunyai hak perwalian, kecuali menurut pendapat ulama syafi'i.⁷

b. Perwalian Bagi Anak Kecil Menurut Hukum Positif di Indonesia

Pembahasan mengenai perwalian didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada pada Pada Pasal 50-54, dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 1 poin (h) dan Pasal 107-112, selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dibahas dalam Pasal 30-36, dan terakhir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bab XV tentang kebelumdewasaan dan perwalian ada pada Pasal 330-432.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 poin (h), menjelaskan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁸

5. Usia Dewasa

Undang-Undang di Indonesia berbeda-beda dalam menyebutkan batasan usia orang dikatakan dewasa, dengan banyaknya yang melatarbelakangi Undang-Undang tersebut maka memungkinkan adanya perbedaan dalam batasan usia dewasa. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 47 dan Pasal 50 yang bisa disimpulkan bahwa Undang-Undang perkawinan berpegang pada patokan usia dewasa adalah 18 tahun.⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membahas tentang kedewasaan dikaitkan dengan usia. Pasal 330 menjelaskan Orang yang telah mencapai usia genap 21 tahun atau telah menikah sebelum mencapai usia itu dianggap sudah dewasa.¹⁰

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau lapangan.

C. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan kualitatif.

⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam*, h. 135

⁷ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian*, h. 208

⁸ Pasal 1 poin (h) Kompilasi Hukum Islam

⁹ Ade Maman Suherman, *Penjelasan Hukum*, h. 13

¹⁰ Ade Maman Suherman, *Penjelasan Hukum*, h. 10

D. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Wawancara dilakukan kepada Salman Rosyidi, SH (selaku petugas di meja pendaftaran Pengadilan Agama Kabupaten Madiun) dan Dr. Dyah Aju Kusumawardani, S.H., M.Hum (Pejabat Pembuat Akta Tanah), selain itu wawancara juga dilakukan dengan Majelis Hakim yang memutuskan mengabulkan permohonan penetapan tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

- a. Penetapan nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn.
- b. Perundang-undangan
- c. Buku
- d. Jurnal

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara
2. Dokumentasi

F. Metode Pengolahan Data

Editing Data, Klasifikasi Data, Verifikasi Data, Analisis Data, Konklusi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam Menerima Permohonan Perwalian

Dari Hasil wawancara, Majelis Hakim dalam menentukan kedewasaan seseorang terutama dalam konteks perkara perwalian ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan penelusuran peneliti Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tapi dalam amar penetapan Majelis Hakim dalam penetapan nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn. menggunakan usia 21 tahun sebagai patokan usia dewasa. Dari sini ada perbedaan antara hasil wawancara dan amar penetapan dari Majelis Hakim.

Sesuai dengan yang tertuang dalam amar putusan penetapan nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn seharusnya Majelis Hakim menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Karena, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 ayat (1) disebutkan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.¹¹ Berarti bisa ditafsirkan bahwa anak yang masih belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah menikah dikatakan belum dewasa dan berarti belum cakap hukum untuk melakukan tindakan hukum. Selanjutnya walaupun anak itu sudah menikah tapi masih belum mencapai 21 tahun tetap dianggap sudah dewasa dan dianggap sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum. Selain itu perundang-undangan yang menggunakan usia 21 tahun sebagai batasan usia dewasa ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tepatnya dalam Pasal 330. Orang yang telah

¹¹ Pasal 107 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

mencapai usia genap 21 tahun atau telah menikah sebelum mencapai usia itu dianggap sudah dewasa.¹²

Kriteria dan syarat seorang bisa mengajukan permohonan penetapan perwalian dari masing-masing Pengadilan Agama berbeda ketentuan, sesuai dengan kebijakan yang ada di Pengadilan Agama masing-masing. Mengenai kriteria orang bisa mengajukan permohonan penetapan perwalian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang dilihat terlebih dahulu apakah orang yang mengajukan itu pantas dan layak untuk menjadi wali dari anak yang akan diajukan perwaliannya. Cara mengetahui apakah orang tersebut benar-benar pantas dan layak untuk menjadi wali bagi anak tersebut, petugas pendaftaran Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menanyakan seputar hubungan dan bukti-bukti autentik yang menunjukkan kedekatan hubungan pemohon.

Secara umum Pengadilan Agama tidak bisa menolak perkara yang diajukan. Kalau tidak menerima perkara berarti Pengadilan Agama tidak bisa menyelesaikan masalah, karena masyarakat membutuhkan penetapan dari PA.¹³ Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa Pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur itu tidak ada atau kurang jelas.¹⁴ Kalau memang tidak ada hukum atau kurang jelas hukumnya maka hakim atau Pengadilan wajib untuk memeriksanya dan mengadilinya. Sebagai seorang hakim harus dapat menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.¹⁵

Peneliti berpendapat seharusnya ibu tidak perlu mengajukan permohonan perwalian, karena secara normatif berlaku otomatis bahwa orang tua kandung itu sudah menjadi wali bagi anaknya, sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa Pengadilan berhak melakukan penunjukan orang lain untuk menjadi wali dalam hal kekuasaan orang tua yang dicabut. Poin selanjutnya juga menyebutkan bahwa Pengadilan Agama wajib menunjuk orang lain sebagai wali bagi anak yang belum mencapai 18 tahun yang ditinggal oleh kedua orang tuanya. Apabila merujuk pada penjelasan tersebut berarti bisa disimpulkan bahwa perwalian hanya ditujukan kepada orang lain selain orang tua kandung, sehingga ibu kandung tidak perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak kandungnya. Dalam perkara penetapan nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn. ini seharusnya yang diajukan dalam persidangan adalah mengenai izin dari ibu untuk menjual tanah waris milik anaknya yang masih di bawah umur. Melihat bahwa secara normatif berlaku otomatis ibu kandung itu menjadi wali bagi anaknya sehingga perwaliannya tidak perlu diajukan dalam persidangan,

¹² Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹³ Azizah, *wawancara* (Madiun, 25 Februari 2015)

¹⁴ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, h. 19

melainkan yang perlu diajukan hanya mengenai perizinan penjualan tanah waris.

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pada prinsipnya anak yang masih belum dewasa berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Ayat berikutnya menjelaskan bahwa orang tua tersebut mewakili anaknya di dalam dan di luar Pengadilan. Merujuk kepada Pasal tersebut seharusnya orang tua itu sudah menjadi wali bagi anak kandungnya dalam melakukan tindakan hukum. Tapi dalam konteks perkara ini orang tua juga harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa orang tua atau wali tidak boleh memindahkan harta anaknya atau anak yang berada di bawah perwaliannya. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak menghendaki”¹⁶ Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anak yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.¹⁷

Untuk mengetahui apakah memang itu merupakan kepentingan anak dan anak menghendakinya, maka harus dilakukan melalui proses persidangan, sehingga Badan Pertanahan Nasional dan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyerahkan hal ini kepada Pengadilan. Karena bukan wewenang Badan Pertanahan Nasional maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk menanyakan apakah hal itu merupakan kepentingan anak dan anak menghendakinya. Tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya menyaksikan tindakan hukumnya saja, menjadi saksi adanya peralihan hak .

Pengurusan permohonan penetapan perwalian ini pada intinya untuk membuktikan dalil-dalil bahwa itu adalah untuk kepentingan anak. Pengajuan permohonan perwalian tersebut juga untuk kehati-hatian apabila terjadi sengketa kedepannya. Ketika sudah ada penetapan perwalian dari Pengadilan Agama ini, maka sudah menjadi bukti kuat untuk menyatakan bahwa anak menghendaki adanya penjualan hak miliknya. Penetapan dari Pengadilan tersebut juga sudah menjadi pegangan atau dasar hukum apabila kelak terjadi sengketa mengenai hak-hak yang telah dijual tersebut. Karena segala produk yang diterbitkan hakim atau Pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan kepadanya dengan sendirinya menjadi akta autentik.

Kompilasi Hukum Islam mengatur juga mengenai hukum kewarisan. Dalam Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “Bagi ahli waris

¹⁶ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁷ Pasal 106 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.”¹⁸ Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam ini menyebutkan bahwa ahli waris yang belum dewasa maka ahli waris tersebut mendapatkan wali berdasarkan putusan Hakim yang diusulkan oleh anggota keluarga. Dalam Penetapan Nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn ini dari pihak keluarga yang mengusulkan untuk ditetapkannya wali yaitu ibu dari anak yang masih di bawah umur tersebut. Ibu mengusulkan yang menjadi wali bagi anak tersebut adalah dirinya sendiri melalui permohonan perwalian tersebut.

B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Penetapan Nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn.

Fenomena yang sedang marak terjadi di masyarakat sekarang ini adalah banyaknya orang tua yang mengajukan penetapan perwalian di Pengadilan Agama. Penetapan perwalian ini untuk melakukan beberapa tindakan hukum yang di dalamnya ada anak yang masih di bawah umur, orang tua tidak selalu bisa langsung mewakili anaknya yang masih di bawah umur. Seperti melakukan transaksi penjualan tanah waris yang di dalamnya ada ahli waris yang masih di bawah umur yaitu masih berusia 16,2 tahun. Dalam transaksi ini anak yang masih di bawah umur tidak bisa melakukan perbuatan hukum sehingga harus di wakilkkan oleh orang yang memang pantas mewakilkkan, yang dalam hal ini adalah ibu kandung anak tersebut. Walaupun di Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam itu mengatakan orang tua berhak mewakili anaknya di luar ataupun di dalam Pengadilan. Tapi pada kenyataannya dalam kasus seperti ini orang tua jika ingin mewakilkkan anaknya dalam melakukan tindakan hukum harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan. Selain itu dalam melakukan tindakan hukum dibutuhkan sebuah bukti atau legalitas.

Perwalian anak akan ditetapkan oleh Majelis Hakim terhadap seseorang yang dinilai mampu menjadi wali yang baik. Tentu saja dalam menetapkan seseorang wali Majelis Hakim akan melakukan banyak pertimbangan sebagai dasar menentukan seorang wali. Dari pertimbangan tersebut, maka hak perwalian anak tidak jatuh ke tangan orang salah. Wali harus bisa menjaga hak-hak anak, karena memang kewajiban wali adalah menjaga diri serta harta anak yang berada di bawah perwaliannya. Dasar pertimbangan dikabulkannya penetapan perwalian ini sesuai dengan yang tertulis di penetapan perkara nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn menimbang bahwa sudah adanya bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon baik tertulis maupun berupa saksi. Menimbang juga kepentingan pemohon dalam mengajukan penetapan perwalian ini, dan pertimbangan-pertimbangan lain yang tertulis di penetapan nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn tersebut.

Hakim melihat beberapa faktor lain sebagai pertimbangan dalam mengabulkan penetapan nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn ini. diantaranya adalah demi kepentingan anak, melihat hal-hal yang menguntungkan anak serta untuk melindungi hak-hak anak. Selain itu,, pemohon juga

¹⁸ Pasal 184 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Agama yang dapat menunjukkan bahwa pemohon memang berhak menjadi wali bagi anak kandungnya untuk mewakili anak yang masih di bawah umur dalam melakukan tindakan hukum. Peneliti menyimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan selain yang sudah tertera dalam penetapan, yang menjadi pertimbangan pokok dikabulkannya penetapan nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn adalah manfaat yang ada pada anak yang berada di bawah perwalian pemohon tersebut, serta kebutuhan pemohon dalam mengajukan penetapan perwalian.

Berdasarkan amar dalam penetapan nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn peneliti menganggap bahwa penetapan tersebut merupakan penetapan ultra petitum, karena dalam petitumnya pemohon hanya meminta tiga hal, tapi kepada Majelis Hakim diberi empat penetapan. Bahwa dalam amar penetapan Majelis Hakim menambahkan amar yang berbunyi memberi izin kepada pemohon untuk menjual tanah dan untuk pemecahan sertifikat. *Petitum* adalah apa yang diminta atau diharapkan penggugat/pemohon agar diputuskan oleh hakim.¹⁹ Jadi tuntutan itu akan terjawab di dalam amar atau dictum putusan.

Penjelasan Majelis Hakim dalam wawancara, pada intinya sama mengatakan bahwa penetapan di atas bukan merupakan penetapan yang ultra petitum. Karena menganggap bahwa penetapan itu harus ada penjelasan untuk apa pemohon mengajukan permohonan penetapan wali. Penetapan yang diberikan juga tidak melenceng atau tidak keluar dari pokok masalah. Hanya untuk mempertegas kegunaan penetapan perwalian itu untuk apa. Dalam bukunya Yahya Harahap mengatakan bahwa hakim boleh memberikan putusan lebih asalkan masih dalam kerangka yang sesuai dan tidak keluar dari inti petitum primair. Pernyataan Yahya Harahap ini mengacu pada Putusan MA No.140 K/Sip/1971.²⁰

Pemohon juga sudah memberikan posita tambahan di dalam persidangan. Posita tambahan itu yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim menambahkan penetapan memberi izin kepada pemohon untuk menjual tanah kepemilikan anak yang berada di bawah perwaliannya, yaitu anak kandungnya yang masih di bawah umur. Kemudian Majelis Hakim juga menggunakan dasar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa hakim itu harus menggali perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Selain itu yang dibutuhkan dalam penetapan perwalian tidak hanya penetapan status saja, tetapi juga dibutuhkan kejelasan untuk apa pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian, yang dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan untuk pemecahan sertifikat dan untuk menjual tanah yang dimiliki anaknya untuk kehidupan anaknya. Alasan memperjelas kegunaan penetapan perwalian, karena Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak mau membubuhkan tanda tangannya apabila

¹⁹ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acarah*. 28

²⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. h. 802

penetapannya itu tidak tidak dijelaskan secara rinci untuk apa permohonan perwalian tersebut.

Majelis Hakim dalam menetapkan penetapan seperti ini sesuai dengan keadaan yang terjadi di masyarakat. Pejabat Pembuat Akta Tanah beranggapan bahwa penetapan perwalian ini hanya bisa digunakan untuk satu tindakan hukum saja. Oleh karena itu, Pejabat Pembuat Akta Tanah meminta penetapan sejelas-jelasnya dari Pengadilan Agama, untuk keperluan apa penetapan itu digunakan. Sehingga secara otomatis Pejabat Pembuat Akta Tanah itu menuntut Pengadilan Agama untuk memberi ketetapan sejelas-jelasnya tentang kegunaan dari permohonan penetapan perwalian tersebut, walaupun pemohon tidak menyebutkan dalam petitumnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam menerima permohonan perwalian oleh ibu kandung terhadap anak di bawah umur mendasar pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak perkara, selama perkara itu merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Selain itu permohonan perwalian yang diajukan oleh ibu kandung terhadap anak yang masih di bawah umur itu untuk membuktikan dalil-dalil bahwa transaksi tersebut bertujuan untuk kepentingan anak dan untuk memberi perlindungan kepada orang tua yang mewakili anaknya apabila suatu saat terjadi sengketa atas orang tua dan anak.
2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Kabupaten Madiun mengabulkan permohonan penetapan ibu kandung sebagai wali terhadap anak di bawah umur dalam Penetapan Nomor 001/Pdt.P/2014/Pa.Kan.Mn adalah bahwa transaksi tersebut demi kepentingan anak yaitu untuk biaya hidup anak. Selain itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hak-hak anak ini harus dilindungi.

B. Saran

1. Pemerintah membuat regulasi atau payung hukum yang jelas mengenai konteks perkara ini, yaitu orang tua yang akan menjual tanah waris milik anaknya yang belum dewasa atau belum cakap hukum.
2. Orang tua yang akan melakukan transaksi penjualan tanah milik anak yang masih di bawah umur hendaknya mengajukan permohonan penetapan perwalian oleh Pengadilan Agama bagi orang yang tunduk pada hukum Islam, dengan petitum agar diberi izin untuk melakukan transaksi penjualan tanah milik anak di bawah umur. Serta siapkan bukti-bukti berupa saksi dan akta autentik agar persidangan tidak berlarut-larut.